

Equator

Rabu, 25 Januari 2012

BPK Periksa Belanja Infrastruktur

PONTIANAK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar melakukan pemeriksaan atas belanja infrastruktur dengan mempertimbangkan faktor pelestarian lingkungan. Pemeriksaan itu dilakukan pada November dan Desember 2011.

"Pemeriksaan infrastruktur kami ini meliputi enam entitas, yakni Provinsi Kalbar, Kabupaten Ketapang, Sintang, Melawi, Sekadau dan Kabupaten Landak," ungkap Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Ir Adi Sudibyo MM saat acara penyerahan hasil pemantauan TLHP dan LHP semester II tahun 2011 di Pontianak beberapa waktu lalu.

Adi menjelaskan, secara umum hasil pemeriksaan atas belanja infrastruktur menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur ada yang dilakukan di kawasan hutan, dengan tidak didahului izin penggunaan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan. Selain itu, analisa dampak lingkungan seperti upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) juga tidak dilaksanakan dengan baik. Untuk itu, BPK mengingatkan kepada DPRD dan para bupati untuk tetap mengikuti peraturan yang ada, mengingat konsekuensi pidana berat dari peraturan bidang kehutanan. (jul)